

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustino, Leo. *Politik Dan Kebijakan Publik*. 1st ed. Bandung: Penerbit AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006.

Almond, Gabriel Abraham. *The Politics of Developing Areas*. *American Sociological Review*. United States: Princeton University Press, 1960.

Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Edited by Beni Ahmad Saebani. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.

Beddy, MI. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Budirdjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Cozby, Paul C. *Methods in Behavioral Research*. PUSTAKA PELAJAR. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication, 1998.

Dayanto, and Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teori, Metode, Dan Teknik Pembentukan*. Malang: Setara Press, 2019.

Gusmansyah, Wery. *Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dalam Perspektif Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Meutia, Intan Fitria. *Analisis Kebijakan Publik*. Edited by Moh. Nizar. Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), 2017.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). *Modul Rancangan Penelitian*. Jakarta: Pusdiklat Kemeneristekdikti, 2019.

Riskiyono, DJoko. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang : Telaah Atas Pembentukan Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Selatan: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2016.

Ruane, Janet M. *Dasar-Dasar Metode Penelitian: Panduan Riset Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

RW, Sri Handayani, and Fais Yonas Yoa. *Partai Politik Dan Pemilu Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Sugiyana, Aritasius, and dkk. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi Dan Program 2004-2009*. Edited by Bambang Setiawan and Nainggolan Bestian. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

Suhawi, Achmad. *Pseudo Partai Politik: Studi Perbandingan PKS, GOLKAR, Dan PDIP*. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Thoha, Miftah. *Birokrasi & Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Thoha, Miftah. *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tim Penyusun PKMK-LAN. *Pengembangan Pola Partisipasi Masyarakat Dalam*

Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, 2012.

Tim Penyusun FISIP Universitas Nasional. 2020. *Pedoman Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.

Tobing, David Hizkia, Yohanes Kartika Herdiyanto, Dewi Puri Astiti, I Made Rustika, Komang Rahayu Indrawati, and Luh Kadek Pande Ary Susilawati. *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif. Simdos.Unud.Ac.Id*. Bali: Universitas Udayana, 2017.

SKRIPSI

Mufiidah, Luthfiyyah. “Marketing Politik Pradi – Afifah Di Pilkada Depok 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Muhammad, Yakub. “Strategi Pemasaran Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif Di Kota Depok Tahun 2019”. Universitas Negeri Semarang, 2020.

Romaliani, Karina. “Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”. Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan, 2020.

JURNAL

Bintari, Antik, and Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan. “Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Perseroan Terbatas (Pt) Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta”. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, No. 2 (2016): 220–238.

Efriza. “Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla”. *Politica*. Vol. 9, No. 1 (2018): 1–16.

Fitriani, Dian, and Neneng Yani Yuningsih. “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur”. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, No. 2 (2016): 330.

Fudin, Hanif. “Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19, No. 1 (2022): 203–224.

Hadi, Syofyan. “Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)”. *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 49–59.

Putri, Rasha Anandya Laksmi, Amalia Diamantina, and Untung Dwi Hananto. “Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Magelang Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6,

No. 1 (2016): 1–11.

Sahri, Muhammad, Sudarsono, and Jazim Hamidi. “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Program JAMKESDA Di Kabupaten Bangkalan” (2011): 1–26.

Tampi, Daniel Mambo, and Amandus Jong Tallo. “Chastelein, Potensi Kawasan Wisata Sejarah Kota Depok”. *Prosiding Kota Layak Huni: Urbanisasi dan Pengembangan Perkotaan*. Vol. 1, No. 1 (2018): 1–10.

Yaqin, Moh Ainul, Sri Budi, and Eko Wardani. “Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin Dan Mujiaman Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020”. *JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN (JIPP)*. Vol. 7, No. 2 (2021): 52–75.

INTERNET

Arbi, Ivani Atina. “Idris-Imam Menang Di Hampir Semua Kecamatan Di Depok, Pengamat Nilai Wajar”. *Kompas.Com*. Depok, 2020. Tersedia pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/15/08095821/idris-imam-menang-di-hampir-semua-kecamatan-di-depok-pengamat-nilai-wajar?page=all>. Diakses pada 17 Januari 2023.

Badan Pusat Statistik Kota Depok. “Kota Depok Dalam Angka: Depok Municipality in Figures 2022” . *Badan Pusat Statistik Kota Depok*. Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2022. Tersedia pada

<https://depokkota.bps.go.id/publication.html>. Diakses pada 15 Januari 2023.

Badan Pusat Statistik Kota Depok. “Profil Kemiskinan Kota Depok 2021”. *Badan Pusat Statistik Kota Depok*. Tersedia pada

<https://depokkota.bps.go.id/publication.html>. Diakses pada 20 Januari 2023.

Badan Pusat Statistik Kota Depok. “Statistik Daerah Kota Depok 2022”. *Badan Pusat Statistik Kota Depok*. Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2022.

Tersedia pada <https://depokkota.bps.go.id/publication.html>. Diakses pada 15 Januari 2023.

Haq, Muhammad Fida Ul. “Kartu Depok Sejahtera Diluncurkan, Begini Cara Daftarnya”. *INews.Id*. Jakarta, 2022. Tersedia pada

<https://www.inews.id/amp/news/megapolitan/kartu-depok-sejahtera-diluncurkan-begini-cara-daftarnya>. Diakses pada 20 Juli 2022.

Kota Depok, Pemerintah. “Sekilas Depok.” *Depok.Go.Id*. Depok, 2020. Tersedia pada <https://www.depok.go.id/>. Diakses pada 15 Januari 2023.

Lantara, Feru. “Warga Depok Rasakan Manfaat Program Kartu Depok Sejahtera”.

ANTARA News Megapolitan. Depok, 2022. Tersedia pada

<https://megapolitan.antaranews.com/amp/berita/191165/warga-depok-rasakan-manfaat-program-kartu-depok-sejahtera>. Diakses pada 20 Juli 2022.

Mantalean, Vitorio. “Ini 7 Layanan Yang Didapat Dari Kartu Depok Sejahtera”.

Kompas.Com. Tersedia pada

<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/09/16/14374231/ini-7-layanan-yang-didapat-dari-kartu-depok-sejahtera>. Diakses pada 20 Juli 2022.

Yopi. “Sejarah Kota Depok”. *Historia.Id*. Jakarta, November 1, 2021. Tersedia pada <https://histori.id/sejarah-kota-depok/>. Diakses pada 15 Januari 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Data Base Peraturan BPK JDIH. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin”, 2011.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>.

Data Base Peraturan BPK JDIH. “UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 2011.

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_2.pdf.

Data Base Peraturan BPK JDIH. “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu”, 2018.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129990/permensos-no-15-tahun-2018>.

Data Base Peraturan BPK JDIH. “Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Bantuan Pangan Kota Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kartu Depok Sejahtera”, 2021.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/197827/perwali-kota-depok-no-73-tahun-2021>.

Pemerintah Daerah Kota Depok. “Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok

Tahun 2021-2026”. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Depok.*

Pemerintah Kota Depok. “Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok”. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Depok.*

[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171927/perda-kota-depok-no-4-tahun-2021.](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171927/perda-kota-depok-no-4-tahun-2021)

Pemerintah Kota Depok. “Peraturan Wali Kota Depok No. 79 Tahun 2022 Tentang Program Kartu Depok Sejahtera”. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Depok.*

Pemerintah Kota Depok. “Peraturan Wali Kota Depok Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Parameter Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok”. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Depok.*

Sekretariat Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024”. *Data Base Peraturan BPK JDIH.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian Lapangan



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Ir. H. Imam Budi Hartono selaku Wakil Wali Kota Depok



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Solahudin selaku Sekretaris Jenderal DPD FORKABI Kota Depok



Wawancara bersama Ibu Rienova Serry D., S.Sos. selaku Anggota Komisi B DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra



Wawancara bersama Bapak H. Imam Musanto, S.Pd., M.M. selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Dalam menunjang hasil dari penelitian ini, dibutuhkan sumber data yang memiliki validitas dan kredibilitas yang diperoleh melalui tahapan wawancara sebagai metode utama melakukan pengkajian data secara mendalam. Adapun pedoman wawancara yang dapat disifatkan secara umum disebabkan oleh adanya keterkaitan antara variabel-variabel sebagai berikut.

Wakil Wali Kota Depok

Nama : Ir. H. Imam Budi Hartono
Jabatan/Instansi : Wakil Wali Kota Depok
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023
Pukul : 15.40 WIB

1. Menurut Pemerintah Kota Depok, apa pentingnya aspek kesejahteraan sosial dalam suatu daerah?	Ya, Pastinya bagi kami pemerintah kota Depok, ataupun pribadi kesejahteraan sosial merupakan sebuah hal penting ya, terutama bagi kami selaku pemerintah untuk dapat mengakomodir, ataupun memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Di Depok ini misalnya kita sudah punya KDS atau Kartu Depok Sejahtera yang sudah terintegrasi dengan DTKS untuk memenuhi hak-hak sosial di masyarakat.
2. Apakah kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh keputusan politik yang baik? Jika iya, bagaimana keputusan politik yang baik menurut Bapak/Ibu?	Kesejahteraan itu memang salah satu faktor nya ada pada keputusan politik, karena memang segala sesuatu dalam negara ini dapat dikatakan diatur oleh yang namanya regulasi, nah regulasi itu sendiri yang dirumuskan oleh faktor-faktor politik. menurut saya baik atau tidaknya keputusan politik itu dapat diukur dari bagaimana data yang diuji saat proses implementasi kebijakan itu sedang berjalan, baru kita bisa katakan ini merupakan keputusan politik yang baik atau tidak.
3. Untuk memenuhi aspek kesejahteraan sosial pada	Iya sebetulnya di Kota Depok sendiri, seperti apa yang tadi saya sudah katakan kita memiliki satu program, yaitu

<p>masyarakat Kota Depok, apa keputusan politik berupa kebijakan atau program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Depok?</p>	<p>Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang memang fokus terhadap bantuan bantuan kesejahteraan khusus untuk masyarakat kota Depok, dengan beberapa parameter yang telah kami tentukan.</p>
<p>4. Menurut Bapak/Ibu, apa itu program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dari Pemerintah Kota Depok?</p>	<p>Program KDS merupakan sebuah program yang memang kami selaku pemerintah kota Depok telah merencanakan dan menjanjikan kepada masyarakat terkait apa apa saja yang tentunya ada dalam KDS tersebut, misalnya dalam KDS ini terdapat tujuh klaster yang mencakup banyak hal, salah satunya kesehatan, bantuan pangan dan lain sebagainya kemudian program ini dikeluarkan dalam bentuk Kartu multichip yang dapat lebih mudah menjangkau segala program serta lebih fleksible untuk dibawa kemanapun karena bentuknya hanya berupa kartu.</p>
<p>5. Apa urgensi yang melatarbelakangi awal mula diusulkannya program Kartu Depok Sejahtera oleh Pemerintah Kota Depok?</p>	<p>Sebetulnya KDS atau Kartu Depok Sejahtera ini kan sudah menjadi suatu janji pada saat kami melakukan kampanye pada pilkada saat itu. Pak Wali dan saya mengharapkan adanya suatu program yang dapat terintegrasi terhadap pendataan kemiskinan serta dapat membantu masyarakat dari mulai urusan dapur dalam hal ini rumah tangga hingga kesehatan dan pendidikan dalam satu bentuk kartu, dari situlah awal mula dari Kartu Depok Sejahtera ini.</p>
<p>6. Bagaimana proses perumusan usulan program KDS tersebut?</p>	<p>Untuk menunjang program penerima manfaat bantuan sosial atau yang saat ini dikenal dengan KDS, kami melakukan koordinasi dengan berbagai dinas pemerintah dan melaksanakan komunikasi lebih lanjut dalam pengintegrasian data kemiskinan yang terhimpun dari dinas pemerintah terkait yang nantinya juga akan menjadi pintu yang menaungi manfaat sosial yang diberikan. Iya pastinya ada pembahasan terlebih dahulu dengan pihak</p>

	<p>DPRD, terkait dengan produk hukum yang nantinya akan berkesinambungan dengan program KDS ini. Pemerintah tidak boleh menggunakan kewenangan yang bertentangan dengan aturan. Maka, perlu berkali-kali rapat untuk me-launching KDS itu. Sebab, menghindari terjadinya salah dalam pelaksanaannya.</p>
<p>7. Seperti apa implementasi dan umpan balik (<i>feedback</i>) dari warga Kota Depok mengenai program KDS yang telah diluncurkan pada tanggal 15 September 2021 dan berjalan hingga saat ini?</p>	<p>Sejauh ini, laporan berdasarkan data yang saya dapatkan dari dinas-dinas terkait ya, dari dinas sosial misalnya, hingga saat ini sebagian dari penerima manfaat KDS ini merasa sangat senang dan bersyukur bahkan untuk periode baru ini di tahun 2023 diperkirakan jumlah pendaftar nya akan meningkat meskipun nantinya akan kami control melalui parameter kemiskinan yang saya sebutkan tadi.</p>
<p>8. Bagaimana sikap dan tanggapan Pemerintah Kota Depok terhadap dinamika yang terjadi saat perumusan program KDS hingga adanya hak interpelasi yang diajukan oleh DPRD Kota Depok?</p>	<p>Berbagai dinamika-dinamika politik terjadi karena memahami KDS itu hanya Bantuan Pangan Kota (BPK). Sementara, KDS ada 7 (tujuh) manfaat yang mana hanya dilihat 1 (satu) manfaat saja.</p>
<p>9. Apakah Pemerintah Kota Depok sudah melakukan komunikasi lebih lanjut kepada partai politik pendukung pemerintah maupun partai non koalisi setelah adanya dinamika yang terjadi di tingkatan DPRD?</p>	<p>Pastinya kalo untuk komunikasi kami selaku Pemerintah Kota Depok melaksanakan komunikasi ke seluruh Partai ya yang ada di DPRD Kota Depok, jadi tidak pilih ini koalisi atau ini oposisi, saya melihat itu urusan DPRD, kami sebagai pemerintah hanya mencoba menjelaskan secara rasional tentang program KDS ini.</p>

<p>10. Menurut Bapak/Ibu, apakah peran pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan kesejahteraan sosial tercapai dan apa harapan Pemerintah setelah program KDS tersebut dirumuskan dan dituangkan ke dalam peraturan atau kebijakan pemerintah?</p>	<p>Iya sebenarnya kalau untuk dibilang tercapai saya kira masih belum ya, karena di KDS ini sendiri masih banyak bantuan yang belum berjalan, baru pendidikan dan bantuan pangan, harapannya jelas bahwa dalam aspek kesejahteraan sosial KDS ini untuk saat ini coba kami prioritaskan untuk seluruh masyarakat Depok yang membutuhkan.</p>
---	--

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Depok

1) Partai Koalisi

Nama : H. Imam Musanto, S.Pd., M.M.
 Jabatan/Instansi : Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
 Pukul : 12.40 WIB

<p>1. Menurut Bapak/Ibu anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, apa pentingnya aspek kesejahteraan sosial dalam suatu daerah?</p>	<p>Aspek kesejahteraan sosial itu merupakan bagian dari aspek dasar kehidupan manusia yang didalamnya terdapat dasar kepentingan, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, ketersediaan sumber daya pangan yang memadai dalam suatu daerah, serta tempat tinggal dan infrastruktur yang mumpuni. PKS sendiri mendorong wakil rakyat bisa menyejahterakan masyarakat salah satunya dengan regulasi antara pemerintah sebagai eksekutif dan kami sebagai legislatif. Dalam hal ini,</p>
--	---

	<p>legislator yang membuat suatu aturan, serta eksekutor yang mengusulkan dan nantinya aturan tersebut eksekusinya dikembalikan kepada eksekutif atau pemerintah.</p>
<p>2. Bagaimana peran DPRD dalam menghadapi kondisi kesejahteraan sosial kota Depok jika dilihat berdasarkan realita dan data yang ada di lapangan?</p>	<p>Jika kita melihat peran di DPRD, misalnya Kota Depok, maka juga ada fungsi pengawasan yang mana kami didalam tugasnya ada beberapa komisi. Kebetulan, saya berada di Komisi D yang memiliki sektor mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Disporyata, hingga Dinas Olahraga dan Pariwisata. Sebenarnya, kita melihat bagaimana kondisi real kondisi di Kota Depok ini melalui laporan data berupa angka yang kami peroleh. Dari laporan yang kami terima, bahwa laporan kerja para Dinas ini sudah tercapai 50-70%, sehingga belum ada yang mencapai 100% dari kinerja yang mereka jalankan dalam sejumlah program kerja yang diserahkan kepada kami legislasi. Melihat kondisi di lapangan saat ini, data dan realita memang tidak jauh berbeda. Maka dari itu, tugas kita mendorong bagaimana agar Pemerintah Kota Depok terus secara data akurat dan realitanya benar tepat sasaran. Disinilah, fungsi <i>controlling</i> pada legislasi untuk mengawasi kesesuaian apa yang direncanakan dengan yang dilakukan di lapangan. Kemudian, terdapat juga laporan akhir tahun yang diterima DPRD berdasarkan realita di lapangan.</p>
<p>3. Perihal program Kartu Depok Sejahtera (KDS), apa urgensi disahkannya program KDS ini oleh DPRD Kota Depok?</p>	<p>Selama masa kampanye tahun 2019, kami mendukung calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang saat ini jadi, yaitu Pak Idris dan Pak Imam Budi, mencanangkan salah satu program KDS. Dengan 1 (satu) kartu, bisa mencakup semuanya dan terintegrasi, misalnya dengan pendidikan dan kesehatan meskipun saat ini warga tersebut memiliki kartu BPJS. Saat DPRD mengadakan rapat dengar</p>

	<p>pendapat, sempat dipertanyakan apakah bisa KDS ini dipergunakan untuk layanan rumah sakit dan hal ini tentu bisa jika KDS itu sudah terintegrasi secara langsung. Saat ini, Pak Wali Kota baru me-<i>launching</i> KDS untuk bantuan anak sekolah, sehingga tidak perlu membayar uang bayaran sekolah, terutama sekolah negeri. Jadi, menggunakan KDS siswa-siswi tinggal duduk manis menikmati pelajaran yang didapat tanpa memikirkan biaya sekolah. Sementara itu, perihal kesehatan sedang diusahakan. KDS menjadi kartu yang dapat terintegrasi dengan semua kebutuhan masyarakat. Walaupun tidak mudah, tentu hal yang biasa dalam dunia politik program sebegus ini santer dipermasalahkan terkait warna dan lainnya. Pada akhirnya, jika tujuan kita untuk menyejahterakan masyarakat akhirnya diterima juga meski ada beberapa catatan dari masyarakat lain. Kemudian, KDS memiliki 7 (tujuh) layanan bantuan sosial atau manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah dan DPRD saat ini juga sedang mengupayakan layanan bantuan kesehatan KDS yang memerlukan sinergitas dengan Dinas Kesehatan, terutama berkaitan dengan anggaran diperoleh dan dicapai, serta disalurkan.</p>
<p>4. Saat program KDS diusulkan oleh Pemerintah Kota Depok, apa tanggapan DPRD Kota Depok, terutama Fraksi PKS, terkait adanya rencana usulan program KDS dari Pemerintah Kota Depok?</p>	<p>Ya, kalau dari kami DPRD Kota Depok Fraksi PKS tentu sangat mendukung. Dikarenakan, masyarakat tidak lagi menggunakan berbagai macam kartu yang berbeda-beda, seperti Kartu KIP, Indonesia Pintar, BPJS, dan lain sebagainya. Cukup dengan KDS masyarakat yang sudah masuk ke dalam data DTKS itu bisa semua mencakup. Dalam KDS ini, semua berbasis ke DTKS walaupun saat ini terdapat perapihan-perapihan, misalnya ke Dinas Sosial. Sehingga, semua pendataan ada pada satu pintu, yaitu Dinas Sosial. Jadi, jangan sampai timbul adanya</p>

	<p>suatu ketimpangan, seperti masyarakat yang satu dapat dan yang lain tidak dapat. Meskipun pada kenyataannya, itu yang terjadi di masyarakat. Namun, kami upayakan meminimalisir dengan pendataan satu pintu tadi dengan menggunakan KDS betul-betul orang yang penerima manfaat mendapatkan 'hak'nya. Jangan sampai orang yang tidak berhak menerima manfaat itu. Maka dari itu, kita sortir dengan menggunakan KDS siapa-siapa mereka yang mendapatkan hak-hak dalam pelayanan sosial. Sementara itu, warga yang tidak terdaftar DTKS atau non-DTKS dapat mengajukan kepada fasilitas yang sudah berada di setiap kelurahan. Warga non-DTKS dapat langsung menyampaikan pengajuan sebagai penerima DTKS dengan memenuhi kriteria KDS yang sudah ditentukan. Kemudian, fasilitator Kelurahan ini yang akan survey ke lapangan guna melihat apakah orang tersebut sesuai kriteria untuk mendapatkan KDS, misalnya dengan melihat tempat tinggalnya, keadaannya, dan lain sebagainya.</p>
<p>5. Seperti apa proses perumusan usulan program KDS tersebut, khususnya peran DPRD dari Fraksi PKS dalam tahapan perumusannya?</p>	<p>Sebenarnya, berawal dari <i>database</i> di masyarakat yang dimiliki oleh Dinas Sosial, dimana mereka sudah memverifikasi dan mengaktualisasi warga-warga yang memang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan, sosial dan segala macamnya. Dinas Sosial juga memiliki tim di beberapa jenjang yang akan memberikan laporan, diantaranya seperti fasilitas kelurahan hingga kelompok kerja di kecamatan. Dari sini lah, kami menentukan kriteria-kriteria KDS, misalnya dilihat dari pekerjaannya, rumahnya dan lainnya. Memang tidak semudah itu, karena data warga Depok mencapai jutaan yang DPRD Fraksi PKS dapatkan dari Dinas Sosial. Maka dari itu, selalu kami lakukan verifikasi agar tidak ada yang terlewat dan jangan</p>

	<p>sampai mendzalimi orang yang seharusnya dapat justru malahan tidak dapat dan yang semestinya tidak dapat malah mendapatkan bantuan KDS.</p>
<p>6. Apakah sempat muncul dinamika-dinamika saat program tersebut diusulkan di tingkatan DPRD?</p>	<p>Iya, namanya di dunia politik tidak semua mulus dan tentu dilalui dengan berbagai dinamika, latar belakang, temuan di lapangan, hingga aduan dari masyarakat. Dinamika seperti ini tentu bagus, namun tidak semua orang menilai ini bagus karena ada beberapa kalangan masyarakat yang mungkin terancam juga dengan kehadiran KDS. Misalnya, adanya KDS membuat orang yang seharusnya bisa menggunakan jasa tertentu untuk mendapatkan bantuan sosial, namun tidak menggunakannya dengan kehadiran KDS. Sehingga, beberapa kalangan mungkin sedikit merasa tidak diuntungkan dengan adanya KDS ini. Hal ini lah yang menimbulkan terjadinya riak-riak kecil di masyarakat atau <i>grassroot</i>, dimana banyak yang menunjukkan pro dan kontra. Namun, bagi saya sendiri itu adalah hal yang biasa dalam sebuah program itu sendiri di tingkat Kota, bahkan di tingkat rumah tangga sehari-hari sering kali terdapat perbedaan pendapat. Jadi, setiap program tentu tidak berjalan mulus dengan usulan, interupsi dan gagasan-gagasan yang mungkin baru. Seperti halnya KDS, mungkin satu sisi kami dari Fraksi PKS pendukung pemerintah kota merasa bahwa program ini sangat baik dan cerdas dengan satu kartu bisa mencakup berbagai layanan sosial. Di sisi lain, ada saja dinamika yang terjadi di tingkatan DPRD dengan mempermasalahkan warna dan nama dari program KDS ini. Kami sendiri di Komisi D saat itu memang menerima surat pembahasan terkait KDS. Kemudian, kami Komisi D membahasnya dan diteruskan kepada Pimpinan Dewan.</p>

<p>7. Setelah program KDS tersebut dirumuskan dan dituangkan ke dalam peraturan atau kebijakan pemerintah, apakah terdapat lika-liku dinamika antara DPRD Kota Depok dengan Pemerintah Kota Depok pasca adanya program KDS ini?</p>	<p>Kalau berbicara lika-liku pasca terbitnya program KDS ini pasti ada. Misalnya, beberapa prasyarat yang diajukan masyarakat belum sepenuhnya mendukung, tetapi hal seperti ini tidak bisa begitu saja atau dengan mudah diubah layaknya membalikkan telapak tangan. Selain itu, juga KDS ini dianggap bisa meng-<i>handle</i> beberapa pekerjaan Dinas, namun ada juga pihak yang merasa khawatir dengan hal ini yang akan menghilangkan pekerjaan beberapa dinas. Jadi, lika-liku dinamika itu cenderung konduktif meskipun ada saja pihak tertentu yang tempramental, tidak setuju, dan berbagai argumentasi lain yang menganggap KDS ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat Depok. Peristiwa ini kami anggap sebagai dinamika dalam sebuah organisasi, terutama DPRD dengan latar belakang partai yang berbeda. Selain itu, sempat muncul juga beberapa protes dan usulan yang datang dari partai oposisi atau non koalisi, misalnya berkaitan dengan distribusi program KDS ini yang belum merata di beberapa Dapil ataupun perihal mekanisme yang dirasa tidak sesuai. Menurut saya, kembali bahwa Indonesia menganut asas musyawarah dan mufakat, sehingga hal-hal yang sekiranya belum disepakati kita bicarakan dengan musyawarahkan. Dengan KDS ini sebenarnya, bisa mempersatukan fiksi-fiksi atau pandangan-pandangan orang yang berbeda-beda.</p>
<p>8. Sikap apa yang diambil oleh Fraksi PKS sebagai anggota DPRD Kota Depok dan sekaligus partai koalisi dalam menghadapi permasalahan program KDS ini?</p>	<p>Dalam menyikapi permasalahan program KDS ini, kami Fraksi PKS berupaya menjelaskan manfaat-manfaat dari KDS tersebut. Penjelasan ini dilakukan oleh Fraksi PKS sendiri dalam sidang-sidang paripurna sampai suasananya juga pernah sedikit memanas, seperti adanya beberapa kali terjadi interupsi terkait KDS ketika sedang membahasnya. Di sisi lain, juga sempat muncul mosi tidak percaya dan somasi yang menjadi bagian yang wajar dalam suatu</p>

	<p>kebijakan. Kemudian, banyak juga orang yang sebenarnya belum mengetahui lebih dalam seperti apa sih jelasnya program KDS ini, karena terkadang orang hanya melihat dari luar dengar omongan “katanya” tidak langsung menyaksikan atau sebagai pelakunya. Fraksi PKS melihat hal ini sebagai hal yang biasa dalam kehidupan politik, dimana pro dan kontra atau pandangan politik pasti dimiliki setiap orang. Apa yang Fraksi PKS kerjakan adalah bagian dari ikhtiar dan keinginan kami supaya warga Depok sejahtera dan makmur. Menurut saya, kegunaan adanya sebuah partai dan parlemen adalah menyatukan berbagai pandangan dan isi kepala setiap orang yang telah menjadi rahmat bagi kita.</p>
<p>9. Lalu, apa yang dilakukan fraksi PKS DPRD Kota Depok yang notabene partai pengusung Walikota dan Wakil Walikota dalam melakukan konsolidasi bersama partai koalisi lainnya dalam merespon dinamika yang terjadi di parlemen Kota Depok?</p>	<p>Tentu ada lobi-lobi antarpartai atau fraksi satu dengan yang lain. Dalam melaksanakan lobi ini, tentunya juga kami cermati pelaksanaannya apakah bisa atau tidak karena jika Fraksi PKS tidak sanggup, maka kami terus terang menyampaikan bahwa kami tidak sanggup menerima lobi tersebut. Namun jika hal tersebut merupakan keinginan bersama, maka tidak apa-apa lanjut dijalankan saja meski memiliki berbeda pandangan.</p>
<p>10. Setelah adanya konflik yang terjadi di parlemen DPRD Kota Depok terkait program KDS ini, apakah terdapat hambatan komunikasi yang dibangun dengan partai oposisi?</p>	<p>Sebenarnya, <i>attack</i> oposisi sudah terjadi realitanya di tubuh pemerintahan. Dengan adanya dukungan kepada program KDS dari partai pengusung (PKS dan PPP-Demokrat), kami berupaya membangun komunikasi dengan partai non koalisi pemerintah Kota Depok. Pada dasarnya, masih lebih banyak kesamaan ketimbang perbedaan dalam DPRD menanggapi permasalahan program KDS ini. Maka dari itu, Fraksi PKS cenderung</p>

	<p>memfokuskan diri pada kesamaan daripada mencari-cari sebuah perbedaan yang akan menimbulkan tertumpuknya organisasi ini pada perbedaan itu. Oleh karena itu, kami cari persamaan-persamaan agar kami lebih mampu kebersamai dengan keinginan dan kebutuhan yang sama antarfraksi di parlemen Kota Depok. Sehingga, menjaga kondusivitas itu menjadi suatu hal yang sangat amat penting dalam kehidupan kita.</p>
--	---

2) Partai Non Koalisi

Nama : Rienova Serry Donie, S.Sos.
 Jabatan/Instansi : Anggota Komisi B DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra
 Hari/Tanggal : Rabu, 4 Januari 2023
 Pukul : 13.00 WIB

<p>1. Menurut Bapak/Ibu anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, apa pentingnya aspek kesejahteraan sosial dalam suatu daerah?</p>	<p>Aspek kesejahteraan sosial tidak terlepas dari Sila ke-5 dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, berbicara tentang kesejahteraan karena sudah merupakan amanat dari UUD NRI 1945 dan Pancasila itu merupakan suatu kewajiban. Rakyat bisa sejahtera dan berbahagia apabila segala aspeknya sudah tercukupi, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan agama masing-masingnya.</p>
<p>2. Bagaimana peran DPRD dalam menghadapi kondisi kesejahteraan sosial kota Depok jika dilihat berdasarkan realita dan data yang ada di lapangan?</p>	<p>Fungsi DPRD ada 3 (tiga) hal, yaitu bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Kalau berbicara tentang kesejahteraan sosial, tentu kami berperan dengan menyikapinya melalui data-data yang ada dan apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu mulai dari angka kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, atau yang lainnya. Jadi, peran kami juga tidak terlepas dari sisi</p>

	<p>pembangunan manusia di masyarakat Kota Depok yang masih produktif dalam bekerja dari data-data tersebut. Jika data itu sudah ada dan kami memilikinya, maka kembali apa yang harus dilakukan oleh anggota dewan berdasarkan legislasi, anggaran dan pengawasan. Misalnya ketika pengawasan itu akan dilakukan, kita harus memiliki payung hukumnya terlebih dahulu di bidang legislasi tadi. Contohnya, bantuan kesejahteraan untuk masyarakat Kota Depok yang diusulkan pemerintah dari janji kampanyenya ini, baik berbentuk tunai, bahan pokok, maupun kartu untuk para pemuda dalam bisa mencari pekerjaan atau menjadi wirausahawan yang baru dengan berbagai pelatihan.</p>
<p>3. Perihal program Kartu Depok Sejahtera (KDS), apa urgensi program KDS dari Pemerintah Kota Depok ini?</p>	<p>Kembali lagi kepada kesejahteraan sosial, sehingga KDS ini diperlukan urgensinya bagi pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga masyarakat yang masih membutuhkan bantuan bahan pokok kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, program KDS ini dari segi konsep yang disusun oleh Pemerintah Kota Depok mempunyai manfaat yang begitu besar untuk menunjang peningkatan dan pengembangan aspek kesejahteraan sosial masyarakat Kota Depok, terutama saat pasca Pandemi ini. Namun sampai saat ini secara pribadi, saya belum melihat atau merasakan apa manfaat dari KDS ini.</p>
<p>4. Saat program KDS diusulkan oleh Pemerintah Kota Depok, apa tanggapan DPRD Kota Depok, terutama Fraksi Partai Gerindra,</p>	<p>Awalnya, usulan program KDS ini memang sempat ada penolakan, khususnya dari Fraksi Gerindra sendiri. Dengan segala perbaikan dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok bersama dengan anggota DPRD dan beberapa pertimbangan pada sidang yang mendorong program ini masuk ke dalam tahapan perumusan.</p>

<p>terkait adanya rencana usulan program KDS dari Pemerintah Kota Depok?</p>	<p>Menurut Fraksi Gerindra, yang pastinya kebijakan yang memperlihatkan manfaat yang baik bagi kesejahteraan sosial Kota Depok tentu saja kami sangat-sangat terbuka dan menerima hal demikian. Sehingga, memang penolakan diawal usulan merupakan sebuah sikap atau tanggapan dari kami yang mana harus melihat dan mengkaji terlebih dahulu manfaat yang diberikan untuk masyarakat Kota Depok secara luas dan benar-benar tepat sasaran atau tidak tepat targetnya.</p>
<p>5. Seperti apa proses perumusan usulan program KDS tersebut, khususnya peran DPRD dari Fraksi Gerindra dalam tahapan perumusannya?</p>	<p>Terkait proses pembahasan perumusan program KDS ini, pengawasan dan anggaran yang dilakukan DPRD Fraksi Gerindra perlu memiliki payung hukum suatu kebijakan. Maka, payung hukum program KDS ini lah yang dibahas dalam tahap perumusan di bidang legislasi. Pembahasan ini bukan hanya dilakukan oleh Fraksi Gerindra, melainkan juga seluruh teman-teman dari fraksi-fraksi yang ada di Kota Depok. Kami di tingkat DPRD Kota Depok disini terdapat 9 fraksi yang hampir semua akhirnya menyetujui program KDS tersebut. Otomatis apabila aturan atau tata tertib DPRD menyatakan bahwa 50+1 dalam sidang paripurna sudah menyetujuinya, maka program KDS ini sudah dapat digulirkan oleh Pemerintah Kota Depok. Oleh karena itu, berbicara terkait KDS ini pastinya sudah masuk dalam program kerja pemerintah, namun hanya saja kami para anggota dewan dari sisi pengawasannya dapat melihat kira-kira pemanfaatan program KDS ini benar-benar sudah tepat pada sasaran bagi masyarakat yang sesuai dengan kriteria dan betul-betul membutuhkan bantuan layanan sosial.</p>

<p>6. Apakah sempat muncul dinamika-dinamika saat program tersebut diusulkan di tingkatan DPRD?</p>	<p>Ya, sejak awal ada gejolak yang mana sejumlah fraksi tidak menyetujui adanya program KDS ini. Namun, hal ini diatasi dengan berbagai data-data dan kajian yang ternyata memang dibutuhkan program semacam KDS ini, sehingga KDS disetujui dan saat ini bisa berjalan. Kemudian, DPRD saat ini sedang melakukan pengawasan mengenai manfaat KDS ini sudah tersalurkan secara baik atau belum agar kami dapat mengukur kesejahteraan sosial dengan membandingkan persentase aspek tingkat kesejahteraan sosial sebelum munculnya KDS dan pasca hadirnya KDS di dalam masyarakat. Awalnya, penolakan Fraksi Gerindra sendiri ini berhubungan dengan data secara autentik mengenai siapa masyarakat yang menerima bantuan KDS ini yang belum kami peroleh secara jelas dari pemerintah. Yang kedua, KDS kami sempat tolak dari pemberian kartu terkait dengan logo, warna dan lain sebagainya seperti yang sudah sering diperbincangkan yang menjadi timbul polemik dalam DPRD itu sendiri.</p>
<p>7. Setelah program KDS tersebut dirumuskan dan dituangkan ke dalam peraturan atau kebijakan pemerintah, apakah terdapat lika-liku dinamika antara DPRD Kota Depok dengan Pemerintah Kota Depok pasca adanya program KDS ini?</p>	<p>Tentu ada beberapa dinamika yang terjadi setelah adanya program KDS ini yang baru kemarin disahkan. Kami dari Fraksi Gerindra bersama fraksi lainnya berupaya menjalankan fungsi pengawasan kami dalam mempertanyakan perumusan kartu dan implementasi dari program KDS itu sendiri. Sehingga, mungkin sempat terdengar juga kami sebagai partai non koalisi melayangkan mosi tidak percaya dan hak interpelasi yang tentu bernilai positif bagi kesejahteraan sosial penduduk Kota Depok.</p>

<p>8. Sikap apa yang diambil oleh Fraksi Partai Gerindra sebagai anggota DPRD Kota Depok dan sekaligus partai non koalisi dalam menghadapi permasalahan program KDS ini?</p>	<p>Apabila sudah disetujui program KDS kuorum 50+1 meskipun kami berada di pihak oposisi, tetap artinya kami menerima kesepakatannya dan wajib terus menyikapinya dengan menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya wakil rakyat. Kami harus selalu mengecek dari sisi kebermanfaatannya KDS tersebut. Misalnya terkait dengan distribusi yang disuarakan oleh masyarakat kurang merata, sikap kami dari Fraksi Gerindra tentu meng-<i>cross check</i> kembali data-data murni yang berasal dari lapangan yang kemudian akan kami tindak lanjuti salah satunya dengan turun langsung ke lapangan dan menghimpun segala aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah melalui forum-forum rapat di dalam DPRD.</p>
<p>9. Lalu, apa yang dilakukan fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok yang notabene partai non koalisi Walikota dan Wakil Walikota dalam melakukan konsolidasi bersama partai koalisi lainnya dalam merespon dinamika yang terjadi di parlemen Kota Depok?</p>	<p>Pada umumnya, yang namanya sebuah fraksi dalam parlemen ketika ada dinamika dari program KDS ini akan melakukan lobi-lobi. Sehingga, nantinya dapat mencapai sebuah kesepakatan yang sudah didiskusikan. Akan tetapi, para anggota dewan tentu tidak akan melakukan hal atau tindakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu saja tanpa melihat dari sisi masyarakat luas. Artinya, kami akan memberikan respon atau menindaklanjuti apabila ini memang harus dibutuhkan sebuah bentuk kesejahteraan yang riil dan terlihat buktinya, maka tidak ada salahnya. Lobi-lobi yang dilakukan oleh Fraksi Gerindra dan fraksi lain yang mengajukan hak interpelasi dan mosi tidak percaya itu bisa diartikan hal yang positif, dimana kami melihat KDS ini sangat perlu tidak untuk Kota Depok dan manfaatnya benar terasa atau tidak.</p>

<p>10. Setelah adanya konflik yang terjadi di parlemen DPRD Kota Depok terkait program KDS ini, apakah terdapat hambatan komunikasi yang dibangun dengan partai koalisi?</p>	<p>Sepertinya, tidak ada semua sudah clear melalui lobi dan kesepakatan yang terjadi. Walaupun mencapai sebuah kesepakatan itu memang sulit, tetapi kami tetap usahakan agar kedepannya kepentingan rakyat menjadi prioritas dan tidak ada <i>miss communication</i>.</p>
--	---

Tokoh Masyarakat

Nama : Solahudin
 Jabatan/Instansi : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) Kota Depok
 Hari/Tanggal : Selasa, 3 Januari 2023
 Pukul : 14.00 WIB

<p>1. Menurut Bapak/Ibu sebagai organisasi masyarakat, seperti apa kepemimpinan Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok bagi masyarakat Kota Depok?</p>	<p>Jika berbicara masalah Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, maka kepemimpinan Pak Wali Kota Depok sendiri sudah hampir 15 tahun menjabat sebagai pemimpin di Depok. Pak Idris memimpin berawal mulai dari Wakil Wali Kota hingga sekarang menjadi Wali Kotanya. Menurut saya, standar yang artinya pembangunan juga tidak begitu besar, tetapi organisasi yang saya jabat ini memandang Pak Wali Kota itu tidak bagus banget. Kita bisa lihat saat ini pembangunan hanya memunculkan banyak apartemen saja muncul, tapi antara jumlah penduduk dan sarana yang dibutuhkan tidak memadai, seperti timbul kemacetan, pemukiman dimana-</p>
---	---

	<p>dimana. Sementara, ruang hijau terbatas yang menjadi masalah. Untuk berbicara kepemimpinan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, masih rata-rata yang mana maju sekali tidak dan mundur sekali pun juga tidak. Perbedaan selama 15 tahun Pak Idris menjabat sebagai pemimpin di Kota Depok memang tidak signifikan hanya saja sekarang lebih banyak pembangunan karena itu merupakan program beliau sebagai janji kampanye yang dijalankan.</p>
<p>2. Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok memiliki beban yang bisa dikatakan sama dalam usaha menyejahterakan, menghimpun dan melaksanakan harapan beserta aspirasi dari masyarakat pada aspek kesejahteraan sosial. Menurut Bapak/Ibu, bentuk peran apa saja yang sudah Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok lakukan dalam merealisasikan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Depok?</p>	<p>Pada prinsipnya, pemerintah dan DPRD sama-sama penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. Kalau berbicara masalah program antara legislatif dan eksekutif harus jalan secara bersama dan mengetahui program tersebut. Namun, tetap eksekutor ada pada lembaga eksekutif, sedangkan DPRD yang membuat kebijakan dan memiliki badan anggaran. Arah ke realisasi kesejahteraan sudah ada, artinya upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat sudah mulai nampak dan sejalan dengan DPRD. Misalnya, bisa kita lihat dari layanan bantuan sosial itu benar berjalan dan ada peran dari pemerintahan untuk mengontrol masalah sosial. Oleh karena itu, harus saling mengetahui program-program yang berjalan sebagai bentuk perannya.</p>
<p>3. Pada 15 September 2021 lalu, Pemerintah Kota</p>	<p>Jelas, kami Forkabi sebagai organisasi masyarakat ikut berperan dalam <i>social control</i> kebijakan tersebut.</p>

<p>Depok telah menerbitkan Program Kartu Depok Sejahtera dengan 7 (tujuh) layanan bantuan sosial yang telah dituangkan dalam UU No. 73 Tahun 2021. Pada saat tahapan perumusan kebijakan atau program dari Pemerintah Kota Depok ini, apakah organisasi masyarakat ikut terlibat atau berpartisipasi dalam menampung segala tuntutan dan dukungan masyarakat saat perumusan program KDS tersebut?</p>	<p>Apabila kami tidak ikut berpartisipasi, maka takutnya akan dipolitisasi kembali. Politisasi menjadi kekhawatiran bagi kami karena kecurigaan kita itu tentu bermacam ragamnya. Kenapa kami ikut berperan? Pertama, kami merasa wajib menjalankan <i>social control</i> dalam organisasi masyarakat dan jangan sampai program KDS ini hanya untuk mementingkan pada satu golongan. Jadi, kami tentu sangat berperan atau terlibat sebagai organisasi masyarakat Betawi yang terstruktur bernama FORKABI ini kami sangat mengawasi kepentingan masyarakat. Meskipun, tidak terlalu signifikan dan banyak yang tidak memenuhi sasaran karena banyak juga masyarakat yang layak tetapi tidak mendapatkan KDS dan masyarakat yang harusnya tidak dapat tetapi malah dapat. Namun, memang partisipasi FORKABI sendiri tidak terlalu fokus memberikan tuntutan masalah kepada pemerintah. FORKABI cenderung melakukan upaya-upaya penuntutan, seperti pembinaan secara organisasi dengan sering berkomunikasi dengan Kesbangpol sebagai <i>leading</i> sektor masyarakat Kota Depok. Kami masih tetap mempercayai kepada para wakil rakyat yang ada dalam perumusan KDS ini. Akan tetapi, saat tidak adanya keadilan dalam pemerintahan di Kota Depok, terutama terkait perumusan KDS ini, tentu kami akan turun paling depan jika dibutuhkan. Untuk ke arah tuntutan, mungkin sampai saat ini belum karena yang kami rasa wajib saat ini melakukan <i>social control</i> itu sudah pasti. Kami tentu juga menampung segala aspirasi dan menyuarakan kepentingan masyarakat sebagai <i>social control</i> sesuai dengan fungsi yang harus kami jalankan dengan tidak</p>
---	--

	<p>harus turun langsung dan bisa melalui para anggota dewan yang kita kenal untuk membantu menyampaikan aspirasi kami. Walaupun, terkadang ketika kami menyampaikan aspirasi masyarakat pun menolak, seperti salah satunya juga pada perumusan KDS ini. Di samping itu, anggota dewan cukup terbuka saat diajak diskusi selama itu sifatnya membangun. Kalau hal-hal yang sifatnya cenderung kritis dan mengarah pada menjatuhkan, kadang-kadang mereka juga menghindar dan lebih mempertimbangkan kembali aspirasi yang disampaikan FORKABI atau bisa dikatakan agak 'jaim' para anggota dewan.</p>
<p>4. Menurut Bapak/Ibu, wujud apa saja yang telah dilakukan LSM atau organisasi masyarakat Kota Depok dalam menjalankan fungsi sosialisasi, komunikasi dan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Depok guna menunjang terbitnya program KDS ini?</p>	<p>Wujud yang kami lakukan adalah kami memberikan informasi kepada setiap anggota DPC bahwa ada program pemerintah yang namanya Kartu Depok Sejahtera (KDS) tolong untuk dipantau program tersebut, serta mohon dibantu akomodir bagi warga yang membutuhkan dan harus masuk kepada bantuan KDS. Jadi, kami memberikan himbauan kepada teman-teman yang berada di bawah DPD karena kami mempunyai DPC di tingkat Kecamatan yang kemudian akan diterjunkan ke tingkat DPRT. Sehingga, hierarki kami jelas yang mana seluruh instruksi DPD insya Allah akan mereka jalankan. Alhamdulillah kami juga memiliki SDM yang berkualitas dan luar biasa. Pada FORKABI sendiri, kami memiliki hierarki dari mulai DPD di tingkat Kota, DPC di tingkat Kecamatan, hingga DPC di tingkat Kelurahan. Dalam hal ini, setiap DPC memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda. DPC FORKABI Kota Depok yang paling aktif dan hidup sebagai barometer itu ada pada DPC Pancoran Mas. Berkaitan dengan</p>

	<p>sosialisasi, setiap ada agenda konsolidasi kami pasti akan sampaikan program pemerintah. Agenda konsolidasi kami lakukan satu bulan sekali, dimana semua informasi yang menyangkut pemerintahan atau terkait dengan situasi dan kondisi negara secara luas kami sampaikan ke anggota dan masyarakat dengan satu komando. Pada saat konsolidasi pula, kami sampaikan untuk berpartisipasi dalam program pemerintah dan memberikan ruang bagi DPC maupun DPRT untuk menyampaikan keluhan kesahnya berkaitan dengan program tersebut.</p>
<p>5. Berdasarkan berbagai data dan informasi melalui pemberitaan, terdapat beberapa polemik pada tahapan pelaksanaan program KDS tersebut, bahkan polemik ini ada sejak perumusan program KDS berlangsung. Dalam hal ini, bagaimana respon dan sikap organisasi masyarakat dalam melihat program KDS tersebut yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun?</p>	<p>Terkait dengan pelaksanaan program KDS yang sedikitnya terdapat permasalahan, tentu kami akan bergerak langsung apabila saat itu DPRD tidak bergerak atau memberikan protes (<i>complaint</i>) kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Waktu itu, memang sempat ada bahasa atau sebutan interpelasi dan mosi tidak percaya dari Fraksi partai non koalisi di DPRD, termasuk juga Gerindra. Artinya, mereka takut menuju pada politisasi karena KDS itu kartunya warna oren, namanya sejahtera dan lain sebagainya. Hal ini memang sudah menjadi pantauan kami FORKABI. Tetapi, dikarenakan DPRD sudah terlebih dahulu bergerak atau bahasa orang Depok-nya itu 'open' terhadap situasi membuat kami belum bergerak secara langsung dan masih diam memantau perkembangan, terkecuali kami dibutuhkan dan perlu membantu menyampaikan adanya polemik. Syukunya DPRD sebagai wakil rakyat sadar akan tupoksi mereka dan merasa perlu memberikan kritik bagi program pemerintah. Pada dasarnya, polemik pemilihan warna dan nama program itu bagi kami sah-sah saja karena</p>

	<p>namanya juga sedang berkuasa. Hari ini yang berkuasa PKS di pemerintah Kota Depok, sehingga mereka melakukan hal itu tidak terlalu masalah bagi kami. Kemudian berhubungan dengan masalah distribusi KDS ini, saya memantau langsung tentu siapapun yang berkuasa akan mementingkan kelompoknya sendiri yang sudah menjadi hukum alam. Tetapi setelah FORKABI bergerak melihat situasi dan kondisi, serta meneliti koordinator di lapangannya, banyak juga yang bukan orang-orang dari PKS atau orang umum, melainkan tidak semua berasal dari PKS. Tentu menurut kami, mereka sudah berjalan sesuai dengan aturan, dimana mereka mendata sesuai dengan kriteria yang ada dan saat survey memang benar layak untuk memperoleh KDS. Namun, masyarakat yang faktanya di lapangan belum terjangkau dengan KDS padahal ia masuk kriteria juga harus bertindak dengan melaporkannya kepada pihak terkait salah satunya para wakil rakyat. Kenapa harus dilaporkan? Karena, pasti yang melaporkan itu orang yang harusnya mendapatkan KDS. Apabila laporannya masuk ke FORKABI, maka tentu kami akan membantu <i>follow up</i> kepada pemerintah dan para wakil rakyat. Maka dari itu, kami berpandangan dalam suatu program harus ada polemik, karena dari situ lah nantinya akan timbul kesepakatan atau konsensus, serta ada <i>input</i> nantinya tentu akan ada <i>output</i> yang datang.</p>
<p>6. Dengan adanya permasalahan dari program KDS ini, apakah menurut Bapak/Ibu Pemerintah</p>	<p>Ya, sudah. Jadi, semua RT sudah mengajukan data ke Dinas Sosial. Dalam koordinasi dan pelaksanaannya, plus dan minus itu pasti ada dan wajar yang nantinya akan ada berbagai pembenahan. Kami sebagai <i>social control</i>, baik menyuarakannya melalui anggota dewan maupun</p>

<p>Daerah Kota Depok telah melakukan koordinasi dan melaksanakan wujud kegiatan di bidang pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial?</p>	<p>pemerintah, itu tentu kami laksanakan. Koordinasi dan pelaksanaan bidang pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial yang dijalankan pemerintah merupakan bagian dari janji kampanye pasangan Idris dan Imam Budi. Hal ini dilakukan dengan adanya program KDS yang diimplementasikan dengan koordinasi pendataan melalui Dinas Sosial kepada kelurahan. Dalam hal ini, RT mengusulkan data-data masyarakat yang membutuhkan, yang kemudian Dinas Sosial bersama koordinator KDS mensurvey secara langsung di lapangan apakah masyarakat tersebut layak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sementara itu, pastinya FORKABI terus memantau bahwa KDS ini harus kami tanggapinya serius dan kami pahami agar masyarakat yang membutuhkan betul-betul mendapatkan bukan masyarakat atau golongan tertentu yang tidak seharusnya menerimanya. Sejauh ini, yang kami pantau sudah berjalan dari 7 layanan sosial KDS adalah bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan kematian meskipun belum terlaksana secara penuh.</p>
<p>7. Menurut Bapak/Ibu, apakah DPRD Kota Depok sudah maksimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya secara optimal terhadap program KDS tersebut?</p>	<p>Menurut saya, sudah maksimal. DPRD sebagai lembaga legislatif sudah memberikan <i>warning</i> kepada pemerintah saat munculnya masalah dalam program KDS. Bagi kami organisasi masyarakat, melihat bahwa DPRD sudah melaksanakan pekerjaan dan tupoksinya dengan baik.</p>
<p>8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu selaku tokoh</p>	<p>Kalau hari ini kita lihat, betul pemerintah daerah Kota Depok sedang dikuasai oleh PKS karena saya</p>

<p>masyarakat menilai Pemerintahan Daerah Kota Depok, terlebih seperti yang diketahui bahwa Kota Depok telah lama dipimpin oleh satu partai yang sama, yaitu PKS?</p>	<p>memandang mereka luar biasa. Saat ini, mereka yang menang tentu wajar karena mereka memiliki sifat militan itu yang luar biasa. Jadi, kita harus melihat secara normatif saja dari pandangan kami hari ini PKS sudah sesuai dengan upaya kinerja mereka. Terpilihnya Pak Idris dan Pak Imam sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan sebuah prestasi. Sehingga, saya merasa tidak perlu ada yang dicemburui dari kepemimpinan mereka karena ini sudah menjadi bagian dari usaha mereka selama ini yang riil. Meskipun seringkali dianggap program KDS menjadi kepentingan golongan tertentu, wajar saja mereka yang sedang berkuasa tentu akan memprioritaskan golongan mereka. Saya melihatnya wajar saja karena tidak ada yang sempurna pemerintahan. Hanya saja kami sebagai <i>social control</i> tetap menjalankan fungsi kami agar program pemerintah berjalan dengan semestinya untuk masyarakat luas. Dengan KDS ini, pemerintah sekurang-kurangnya sudah menunjukkan bahwa adanya program tersebut ditujukan untuk masyarakat Depok bukan hanya untuk golongan penguasa saja. Bagi saya, masalah mosi tidak percaya dan hak interpelasi yang diajukan partai non koalisi di DPRD adalah permainan yang biasa dalam dunia perpolitikan dan buktinya saja hari ini sudah selesai secara damai. Dinamikanya memang seperti itu dan jangan kita melihat sebagai kekacauan karena nyatanya tidak itu hanya sandiwara mereka yang nantinya sudah tertebak ujungnya akan seperti apa. Kalau sudah satu meja dan adanya tawar-menawar, maka ya sudah hanya sampai disitu. Seperti yang kita lihat diberita dan publik, sangat ramai pertengkaran dengan mosi tidak percaya dan hak</p>
---	---

	<p>interpelasi yang ingin dijalankan, hingga adanya pemakzulan. Hal ini memang sah-sah saja para anggota dewan berbicara dan bertindak seperti itu. Namun masyarakat bisa membacanya, paling juga akhirnya berdamai dengan berbagai lobi dan <i>bargaining</i> atau melalui cara “<i>wani piro</i>” ya begitu lah kira-kira. Sekarang, kita lihat bagaimana KDS tetap berjalan dan situasi kembali aman dengan beberapa hal di belakang meja yang masyarakat tidak ketahui. Hal-hal yang diajukan DPRD saat polemik KDS ini muncul itu sebagai ketakutan politisasi bagi kubu di luar pemerintah yang melihat KDS ini memiliki logo dan warna oren, nama kartu dengan kata “Sejahtera”, serta ada foto Pak Wali dan Wakil yang bagi saya wajar dilakukan DPRD, begitupun pemerintah yang berkuasa wajar saja membuat program seperti itu. Di samping itu, DPRD dari partai non koalisi sekaligus juga mumpung ada kemungkinan politisasi ini dimainkan lah sebagai bahan oleh mereka. Terlepas dari segala polemik permasalahan yang terjadi, KDS ini tetap berjalan dengan baik dan semestinya untuk mensejahterakan masyarakat. Kami melihat berbagai permasalahan, termasuk kecurigaan atas KDS yang muncul semakin membuat pemerintah waspada dan membantahnya dengan membuktikan melalui kinerja Pak Wali Kota yang dapat dilihat pada berjalannya KDS hingga saat ini.</p>
<p>9. Seperti apa menurut Bapak/Ibu selaku tokoh masyarakat terkait peluang partai lain dalam mengimbangi kekuatan</p>	<p>Menurut saya, mengimbangi kekuatan politik PKS bisa dengan berkoalisi dan berkonflik. Namun, kedua hal ini juga agaknya belum tentu kuat di Pemerintahan Daerah Kota Depok. Dikarenakan, hari ini kita bisa acungi jempol untuk PKS itu luar biasa. Saat bertanding, PKS</p>

<p>politik PKS dalam Pemerintahan Daerah Kota Depok?</p>	<p>melihat lawannya sebagai musuh, namun setelah menang menganggap lawan mereka sebagai saudara. Artinya, hebatnya PKS bisa langsung merangkul lawannya. Selain itu, dari segi suara pun PKS paling vokal diantara yang lain dan konsisten pada pendapatnya, sehingga membuat masyarakat senang dengan orang PKS. Komunikasi dengan kami sebagai organisasi masyarakat pun Alhamdulillah berjalan lancar dan baik. Kami sering diundang dan terlibat dalam beberapa agenda, seperti salah satunya pembasmian miras dan pemusnahan barang-barang yang diambil Satpol PP.</p>
--	---



Lampiran 3 Cek Plagiasi Turnitin

SKRIPSI FIONA

ORIGINALITY REPORT

10 %	7 %	1 %	6 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	4%
2	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1%
3	qdoc.tips Internet Source	<1%
4	depok.tribunnews.com Internet Source	<1%
5	id.m.wikipedia.org Internet Source	<1%
6	www.scribd.com Internet Source	<1%
7	documents.mx Internet Source	<1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
9	e-jurnal.peraturan.go.id Internet Source	<1%
